



Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah

Alifia Siska Yuliana*¹⁾, Kiky Asmara²⁾

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur¹⁻²

Email : alifiasy17@gmail.com

ABTRACT

Regional government expenditure is reflected in regional expenditure. Regional spending allocations must be adjusted to clear development goals. In 2022, East Java Province recorded revenue realization of 107.4%, while regional expenditure realization was 92.47%. Regional expenditure is influenced by several factors that need to be known in order to allocate it according to targets. Therefore, the aim of this research is to see the influence of PAD, balancing funds, and population on regional expenditure in East Java Province in 2008-2022 using multiple linier regression analysis method. So it is known that the variables PAD, balancing funds, and population during simultaneous testing have a significant effect on regional spending. Meanwhile, partially the two variables, namely PAD and balancing funds, are positively related and have a significant influence, but the population variable does not have a significant influence on regional expenditure. So it would be better for the East Java Provincial government to intensify regional expenditure allocations to support public services for the sake of realizing community welfare.

Keywords: *Regional Expenditure, PAD, Balancing Funds, Population.*

ABSTRAK

Pengeluaran pemerintah lingkup daerah tercermin dalam belanja daerah. Alokasi belanja daerah harus disesuaikan dengan tujuan pembangunan yang jelas, pada tahun 2022 Provinsi Jawa Timur mencatat realisasi pendapatan sebesar 107,4% sedangkan untuk realisasi belanja daerah sebesar 92,47%. Belanja daerah dipengaruhi beberapa faktor yang perlu diketahui agar dapat mengalokasikannya sesuai sasaran. Oleh karena itu tujuan penelitian ini guna melihat pengaruh PAD, dana perimbangan, dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2022 menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Sehingga diketahui variabel PAD, dana perimbangan, dan jumlah penduduk saat pengujian simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Sedangkan secara parsial kedua variabel yaitu PAD dan dana perimbangan berhubungan positif dan mempunyai pengaruh signifikan, namun variabel jumlah penduduk tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Sehingga sebaiknya pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat mengintensifkan alokasi belanja daerah untuk menunjang pelayanan publik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Belanja Daerah, PAD, Dana Perimbangan, Jumlah Penduduk.

PENDAHULUAN

Setiap daerah mempunyai wewenang untuk mengurus sendiri daerahnya. Sehingga pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam mengambil keputusan terkait kepentingan lokal. Hal itu disebut dengan otonomi daerah, dimana bukan berarti keleluasaan untuk mengurus sendiri daerahnya, melainkan kebebasan dengan tanggungjawab penuh mengingat pemerintah pusat bertindak sebagai pemangku mekanisme kontrol atas pengaplikasian otonomi daerah agar tidak melenceng dengan kebijakan pemerintah pusat (Zubaedah & Hafizi, 2022). Otonomi daerah memicu adanya desentralisasi yang mengacu pada manajemen keuangan daerah serta perancangan ekonomi mencakup pembentukan program pembangunan daerah dari pelimpahan pusat ke daerah.

Desentralisasi fiskal bagi pemerintah daerah memiliki peran optimal untuk wewenangnya terhadap mengendalikan daerah. Kemandirian guna menaikkan pendapatan untuk mendukung pembangunan daerah merupakan konsekuensi dari implementasi desentralisasi fiskal bagi pemerintah daerah. Dasar hukum yang menyatakan otonomi daerah serta desentralisasi fiskal yaitu UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. Dinyatakan pemerintah daerah dan pusat dalam perimbangan keuangan berupa desentralisasi fiskal menerapkan konsep uang mengikuti fungsi (*money follows function*). Penyerahan wewenang diikuti dengan pelimpahan sumber pendanaan, seperti perpajakan serta bantuan dalam bentuk dana transfer (Santi & Iskandar, 2021).

Kinerja keuangan pemerintah daerah terlihat pada realisasi anggaran dengan membandingkan realisasi dengan anggaran yang direncanakan selama suatu periode pelaporan (Suhaedi, 2019). Dalam sebuah APBD, penilaian yang vital adalah penilaian terhadap belanja daerah. Pengalokasian belanja daerah harus disesuaikan dengan sasaran pembangunan yang jelas, sehingga realisasi belanja daerah sangat krusial bagi pemerintah daerah untuk memperlihatkan pengelolaan anggaran yang efisien. Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) dipengaruhi oleh pendapatan yang diterima daerah. Menurut Wagner dalam (Dumairy, 1999) terdapat lima hal penyebab pengeluaran pemerintah terus mengalami peningkatan yaitu adanya tuntutan peningkatan pertahanan dan keamanan, pendapatan masyarakat yang semakin meningkat, urbanisasi disertai pertumbuhan ekonomi, demokrasi, dan ketidakefisienan birokrasi yang menyertai transformasi pemerintah.

Belanja daerah mencerminkan pengeluaran pemerintah dalam lingkup daerah. Menurut (Bahrudin, 2017) belanja daerah berarti tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengurangi nilai kekayaan bersih. Sedangkan menurut (Ismail & Rahim, 2009) belanja daerah melingkupi keseluruhan biaya dari Kas Umum Daerah diambil dari ekuitas dana lancar, berarti tanggung jawab daerah selama 1 periode tidak diterima pembayaran kembali. Adolf Wagner yang merupakan ekonom Jerman melakukan pengamatan pada abad ke-19 terhadap negara-negara Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa yang menggambarkan

peningkatan kecenderungan pemerintah dalam hal perekonomian. Pengukuran tersebut menggunakan perbandingan produk nasional dengan pengeluaran pemerintah. Kemudian Adolf Wagner menamakan "hukum aktivitas pemerintah senantiasa meningkat" (*law of growing public expenditure*). Sedangkan Richard A. Musgrave menamakan "hukum pengeluaran pemerintah senantiasa meningkat" (*law of growing public expenditure*) (Dumairy, 1999).

Salah satu sumber belanja daerah berasal dari PAD. Menurut Wulandari & Iryanie (2018) PAD adalah salah satu elemen APBD. PAD merupakan segala penerimaan berasal dari daerah didapatkan berlandaskan peraturan daerah sejalan peraturan perundang-undangan. Penjelasan tersebut juga selaras Pasal 1 UU No. 3 Tahun 2004. Berdasarkan Peacock dan Wiseman dalam (Dumairy, 1999) mengemukakan bahwa pemerintah terus berupaya menaikkan pengeluarannya dengan menggunakan pendapatan dari pajak. Namun, hal tersebut bertentangan dengan masyarakat karena tidak menyukai pembayaran pajak yang semakin tinggi.

Dana perimbangan juga berkontribusi dalam membiayai belanja daerah. Dana perimbangan berarti anggaran berasal dari pendapatan APBN diperuntukkan daerah demi mendanai kepentingan daerah guna aktualisasi desentralisasi dengan tujuan membentuk kesepadanan keuangan antar pemerintah daerah dan pusat (Ismail & Rahim, 2009). Unsur dana perimbangan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu DAU, DAK, dan bagian untuk daerah hasil pemasukan dari pengelolaan SDA (Sjafrizal, 2018). Pada tahun 2016 dana perimbangan diubah menjadi Dana Transfer Umum meliputi DAU dan DBH, kemudian Dana Transfer Khusus dikelompokkan menjadi DAK Fisik dan DAK Non Fisik (Bahrudin, 2017).

Pada era otonomi daerah, asal pembiayaan pembangunan daerah (*capital investment*) bersumber dari pendapatan daerah yaitu mencakup PAD, serta dana perimbangan meliputi DAU, DAK, dan DBH (Arina et al., 2021). Selain itu, terdapat pula pembiayaan berupa pinjaman daerah. Belanja daerah untuk pembangunan ekonomi akan meningkat seiring dengan peningkatan penerimaan pendapatan daerah. Selain itu SDM juga bisa dapat memiliki andil dalam alokasi belanja daerah. Jumlah penduduk merupakan modal untuk pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah dengan meningkatkan kualitas sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap eskalasi produksi (Dahliah, 2022). Jumlah penduduk yang semakin meningkat namun memiliki kualitas yang rendah, akan menjadi beban pembangunan karena memiliki produktivitas yang rendah pula, sehingga berdampak pada alokasi belanja daerah.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada tahun 2022 Provinsi Jawa Timur mencatat realisasi pendapatan sebesar 107,4% sedangkan untuk realisasi belanja daerah sebesar 92,47%. Kemudian PAD yang termasuk pendapatan daerah terakumulasi penerimaan pajak diantaranya retribusi dan pajak daerah, penerimaan investasi, penerimaan non pajak, serta pengelolaan SDA

mengalami perkembangan sebesar 12,26% dari tahun sebelumnya. Partisipasi PAD terhadap pembiayaan kebutuhan daerah dapat menjadi acuan untuk menilai bagaimana kinerja keuangan daerah. Apabila kontribusi PAD tinggi dibandingkan transfer dana dari pusat guna membiayai belanja daerah, maka kinerja keuangan daerah tersebut dinilai baik. Sejalan dengan tingginya PAD, belanja daerah juga meningkat. Hal tersebut selaras penelitian (Nailufar & Sufitrayati, 2019) disebutkan pengaruh positif PAD terhadap belanja daerah.

Pendapatan daerah selain bersumber dari PAD, didukung juga oleh dana perimbangan. Tidak dipungkiri bahwa adanya pengalokasian berasal dari APBN untuk desentralisasi, diharapkan mampu mewujudkan stabilitas keuangan setiap daerah sehingga dapat mendanai keperluan pengeluaran daerahnya. Namun pada tahun 2022 perkembangan dana perimbangan sebesar -30,44%. Angka tersebut mencerminkan penurunan perkembangan dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk Provinsi Jawa Timur daripada tahun sebelumnya. Apabila dana perimbangan meningkat, dapat mendanai pengelolaan pemerintah sehingga implikasinya belanja daerah mengalami peningkatan apabila dana perimbangan juga meningkat. Selaras penelitian (Malau et al., 2023) disebutkan pengaruh signifikan dana perimbangan terhadap belanja daerah.

Peningkatan jumlah penduduk, dengan usia angkatan kerja akan memungkinkan terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa sehingga menghasilkan penduduk dengan usia angkatan kerja sebagai faktor produksi yang dapat mempercepat pembangunan (Kanaan & Setyowati, 2023). Jumlah penduduk berdasarkan Badan Pusat Statistik adalah besarnya penduduk pada suatu waktu di suatu daerah. Jumlah dan pertumbuhan penduduk menggambarkan keterangan dan bukti dasar vital guna perancangan pembangunan (Kuncoro, 2006). Perbandingan besarnya jumlah penduduk umur produktif (15-64 tahun) terhadap umur non produktif disebut sebagai bonus demografi. Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 termasuk dalam tiga Provinsi yang berada pada tahap akhir bonus demografi dengan klasifikasi ekonomi tingkat tinggi. Menurut Hasan & Azis (2018) bonus demografi berarti keadaan transformasi pengelompokan usia penduduk hasil dari peralihan demografi, yakni menurunnya tingkat kematian dan kelahiran. Selama lima belas tahun terakhir di Provinsi Jawa Timur dari 2008-2022 peningkatan jumlah penduduk terbesar terjadi tahun 2020 yaitu sebesar 2,44%. Dalam penelitian (Utami & Iskandar, 2020) disebutkan pengaruh positif jumlah penduduk terhadap belanja daerah.

Oleh karena itu, maksud adanya penelitian ini guna melihat apakah ada pengaruh antara PAD, dana perimbangan, dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah di Provinsi Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kuantitatif yang merupakan metode dengan tujuan mengamati suatu sampel atau populasi, menghimpun data

memanfaatkan instrumen penelitian, sifatnya kuantitatif guna mengevaluasi dugaan yang diputuskan (Sugiyono, 2013). Variabel yang dipakai diantaranya belanja daerah sebagai variabel dependen (Y). Kemudian PAD (X1) dalam juta rupiah, dana perimbangan (X2) dalam juta rupiah, dan jumlah penduduk (X3) dalam jiwa sebagai variabel independen (X) dengan daerah Provinsi Jawa Timur menggunakan data *time series* (runtut waktu) periode tahun 2008-2022. Pengujian data memanfaatkan program aplikasi *software* IBM SPSS 27.

Kemudian data akan dilakukan pengujian asumsi klasik sehingga harus terpenuhi persyaratan dasar BLUE, dengan serangkaian uji. Setelah itu dilaksanakan regresi linier berganda guna melihat pengaruh antar variabel. Model regresi linier berganda menurut Ghozali (2018):

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_n X_n + e$$

Mengacu pada model di atas, sehingga penelitian ini menerapkan model sebagai berikut:

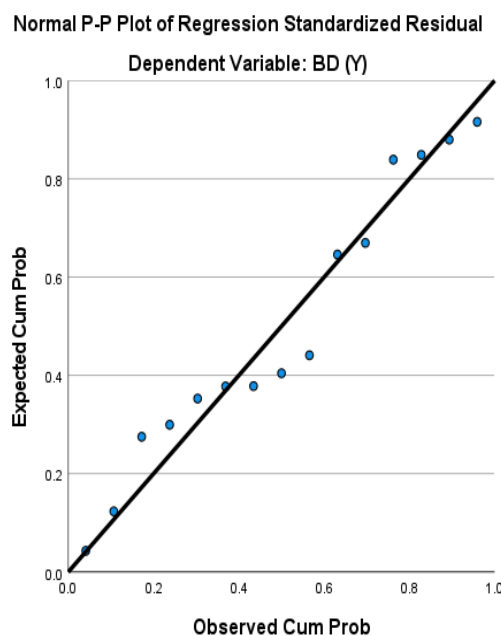
$$BD = \beta_0 + \beta_1 PAD + \beta_2 DP + \beta_3 JP + e$$

Kemudian setelah melakukan analisis regresi linier berganda, dilanjutkan dengan uji koefisien determinasi (R^2), uji simultan (uji F), dan uji parsial (uji t).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Gambar 1. Grafik Normal P-Plot Regression



Sumber: Output SPSS

Hasil di atas, diketahui data memencar mengikuti garis diagonal. Sehingga berdasarkan pengambilan keputusan, kesimpulannya model regresi berdistribusi normal sehingga terpenuhinya syarat normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Colinarity Statistics	
	Tolerance	VIF
PAD (X1)	0.108	9.243
Dana Perimbangan (X2)	0.239	4.176
Jumlah Penduduk (X3)	0.106	9.404

Sumber: Output SPSS

Hasil di atas, diketahui nilai *Tolerance* > 0.01 dan nilai VIF < 10 dari semua variabel independen. Kesimpulannya antar variabel independen terbebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

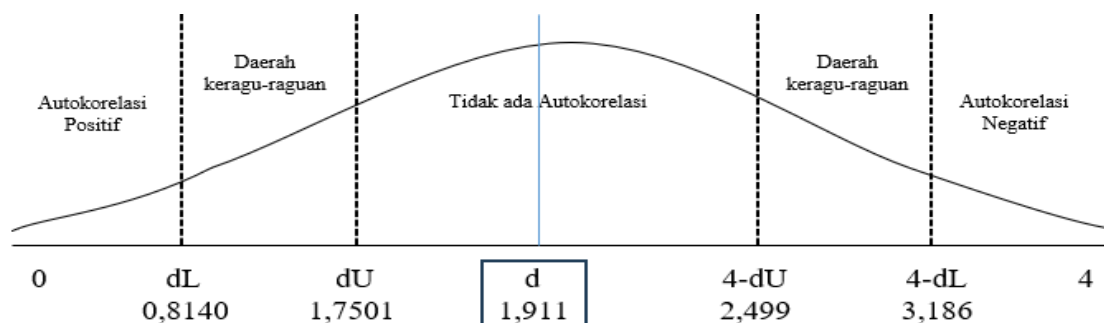
Model	Sig.
(Constant)	.262
PAD	.588
Dana Perimbangan	.109
Jumlah Penduduk	.267

Sumber: Output SPSS

Hasil di atas, diketahui uji glejser memperoleh nilai tingkat signifikansi semua variabel independen lebih dari 5% (0.05). Kesimpulannya terbebas dari heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Gambar 2. Nilai Durbin Watson



Sumber: Output SPSS

Hasil di atas, diketahui nilai d (Durbin Watson) = 1.911. Sedangkan untuk k (jumlah variabel bebas) sebanyak 3, serta n (tahun) sebanyak 15, sehingga didapatkan nilai dL = 0.8140 dan dU = 1.7501. oleh karena itu $dU < d < 4-dU = 1.7501 < 1.911 < 2.499$ kesimpulannya bebas dari autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda**Tabel 3.** Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	B	Std. Error
(Constant)	-10961911.7	28067728.32
PAD (X1)	1.261	.188
Dana Perimbangan (X2)	.583	.127
Jumlah Penduduk (X3)	.283	.779

Dependen Variabel: Belanja Daerah (Y)

Sumber: Output SPSS

Hasil di atas, didapatkan model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = - 10961911.7 + 1.261 \text{ PAD} + 0.583 \text{ DP} + 0.283 \text{ JP} + e$$

Sehingga hasil model persamaan regresi linier berganda tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

1. Konstanta = -10961911.7

Konstanta memiliki nilai negatif yang menunjukkan apabila PAD (X1), dana perimbangan (X2), dan jumlah penduduk (X3) dianggap stabil atau tetap, nantinya dapat membuat belanja daerah (Y) mengalami penurunan sebanyak 10.961.911,7 juta rupiah.

2. PAD = 1.261

PAD memiliki koefisien regresi bernilai positif sehingga menggambarkan apabila PAD (X1) meningkat, maka akan meningkatkan belanja daerah (Y) sebanyak 1.261 juta rupiah.

3. Dana Perimbangan = 0.583

Dana perimbangan memiliki koefisien regresi bernilai positif sehingga menggambarkan apabila dana perimbangan (X2) meningkat, maka akan meningkatkan belanja daerah (Y) sebanyak 583 juta rupiah

4. Jumlah Penduduk = 0.283

Jumlah penduduk memiliki koefisien regresi bernilai positif sehingga menggambarkan apabila jumlah penduduk (X3) meningkat, maka akan meningkatkan belanja daerah (Y) sebanyak 283 juta rupiah.

Uji Koefisien Determinasi (R²)**Tabel 4.** Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

R Square	.988
Adjusted R Square	.984

Sumber: Output SPSS

Hasil di atas, didapatkan hasil R Square = 0.988, artinya variabel PAD (X1), dana perimbangan (X2), dan jumlah penduduk (X3) mampu menjelaskan bahwa variabel belanja daerah (Y) dipengaruhi sebesar 98.8%.

Uji Simultan (F)**Tabel 5.** Hasil Uji Simultan (Uji F)

N	F hitung	F tabel	Sig.
15	297.103	3.587	0.001

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan hasil di atas, didapatkan F_{hitung} sebesar 297.103 dengan nilai signifikansi sebesar 0.001. Kemudian F_{tabel} sebesar 3.587 dengan signifikansi $\alpha = 0.05$. Oleh karena itu menunjukkan hasil $F_{hitung} > F_{tabel} = 297.103 > 3.587$. Sehingga kesimpulannya variabel PAD (X1), dana perimbangan (X2), dan jumlah penduduk (X3) melalui pengujian simultan berpengaruh terhadap variabel belanja daerah (Y).

Uji Parsial (Uji t)**Tabel 6.** Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel Independen	t_{hitung}	Sig.	t_{tabel}
PAD (X1)	6.698	0.001	2.20099
Dana Perimbangan (X2)	4.585	0.001	2.20099
Jumlah Penduduk (X3)	.362	.724	2.20099

Variabel Dependen: Belanja Daerah (Y)

Sumber: Output SPSS

Hasil di atas, didapatkan uji t sebagai berikut:

1. PAD (X1)

Variabel PAD (X1) mempunyai nilai t_{hitung} 6.698 > t_{tabel} 2.20099 dan signifikansi $0.001 < 0.05$. Kesimpulannya PAD (X1) berhubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah (Y).

2. Dana Perimbangan (X2)

Variabel dana perimbangan (X2) mempunyai nilai t_{hitung} 4.585 > t_{tabel} 2.20099 dan signifikansi $0.001 < 0.05$. Kesimpulannya dana perimbangan (X2) berhubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah (Y).

3. Jumlah Penduduk (X3)

Variabel jumlah penduduk (X3) mempunyai nilai t_{hitung} 0.365 < t_{tabel} 2.20099 dan signifikansi $0.724 > 0.05$. Kesimpulannya jumlah penduduk (X3) berhubungan positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah (Y).

PAD

Hasil penelitian memperlihatkan PAD berhubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah sehingga selaras dengan hipotesis. Apabila PAD meningkat, maka dapat menyebabkan kenaikan belanja daerah juga. Hal itu karena PAD secara keseluruhan berkontribusi besar dalam penyelenggaraan belanja daerah. Perkembangan PAD selama 15 tahun terakhir dengan fluktuasi, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga minus dari perkembangan tahun sebelumnya. PAD menurun dikarenakan kendaraan bermotor baru yang penjualannya menurun juga sebagai dampak Covid-19 adanya insentif pajak yang diberikan kepada wajib pajak sehingga menyebabkan pendapatan perpajakan juga menurun. Belanja daerah dipengaruhi optimal dengan PAD. Meningkatnya PAD setiap tahunnya menandakan suatu daerah dapat mandiri dalam memenuhi pembiayaan belanja daerahnya. Karena diketahui bahwa PAD adalah sumber penerimaan untuk mencukupi keperluan daerah, sehingga dapat dikatakan merupakan aspek yang menentukan meningkat dan menurunnya belanja daerah. Provinsi Jawa Timur untuk PAD ditopang oleh komponen pajak daerah termasuk didalamnya yaitu pengoptimalan implementasi kebijakan insentif pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Selaras dengan penelitian (Dahliah, 2022) mendapatkan hasil belanja daerah dipengaruhi positif dan signifikan oleh PAD, akibatnya terjadinya penurunan atau peningkatan PAD dapat mempengaruhi belanja daerah.

Dana Perimbangan

Hasil penelitian memperlihatkan hubungan positif dan mempunyai pengaruh signifikan dana perimbangan terhadap belanja daerah jadi selaras dengan hipotesis. Apabila dana perimbangan terjadi kenaikan, maka dapat menyebabkan kenaikan belanja daerah juga. Hal itu karena dana perimbangan dapat dimanfaatkan guna mendanai berbagai pelayanan publik dan kebutuhan pembangunan yang tercakup dalam belanja daerah. Dana perimbangan Provinsi Jawa Timur berkembang selama 15 tahun terakhir dengan mengalami fluktuasi. Perkembangan tertinggi pada tahun 2016, lalu perkembangan terendah pada tahun 2022. Perkembangan dana perimbangan yang meningkat sangat signifikan tahun 2016 didukung oleh implementasi program amnesti pajak yang cukup baik sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan pemerintah pusat. Sehingga, dapat meningkatkan dana perimbangan disebut juga pendanaan transfer kepada daerah khususnya Provinsi Jawa Timur. Dana perimbangan secara optimal mempengaruhi belanja daerah. Setiap daerah akan tetap bergantung pada dana perimbangan tak terkecuali Provinsi Jawa Timur. Karena dana perimbangan memiliki sifat untuk menumpas kesenjangan fiskal dalam mendanai kebutuhan daerah guna pelaksanaan pembangunan daerah. Seperti diketahui bahwa dana perimbangan mewujudkan *revenue* atau penerimaan yang diperoleh dari transfer dana pusat ke daerah. Sehingga, dengan perolehan dana

perimbangan akan berakibat terhadap pembelanjaan daerah mengalami peningkatan. Selaras dengan penelitian (Marbun et al., 2022) mendapatkan hasil pengaruh positif dan signifikan dana perimbangan terhadap belanja daerah, berarti apabila dana perimbangan terjadi penurunan atau peningkatan maka dapat mempengaruhi belanja daerah. Digunakannya data dana perimbangan pada penelitian ini merupakan kebaruan, karena pada penelitian sebelumnya menggunakan data salah satu dana perimbangan yaitu DAK, DAU, ataupun DBH. Sedangkan penelitian ini menggunakan data dana perimbangan secara keseluruhan sebagai variabel independen.

Jumlah Penduduk

Hasil penelitian memperlihatkan hubungan positif jumlah penduduk namun tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Alasan tidak signifikannya pengaruh jumlah penduduk terhadap belanja daerah disebabkan oleh lebih besarnya pengaruh faktor-faktor di luar model pengujian. Provinsi Jawa Timur mengalami perkembangan jumlah penduduk selama 15 tahun terakhir dengan penurunan. Namun, pada tahun 2020 mengalami perkembangan dengan peningkatan sebesar 2,44% serta jumlah penduduk sebanyak 40.665.696 jiwa. Berdasarkan hasil sensus diperoleh bahwa nyaris separuh penduduk Provinsi Jawa Timur ialah kelompok Milenial dan Gen Z. Komposisi penduduk tahun 2020 yaitu 1,11% Pre-Boomer, 14,81% Baby Boomer, 23,96% Gen X, 24,32% Milenial, 24,80% Gen Z, dan 9,37% Post Gen Z. Sedangkan rasio jenis kelamin sebesar 99,60 dengan lebih banyaknya jumlah penduduk perempuan dibandingkan laki-laki. Jumlah penduduk tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja daerah Provinsi Jawa Timur, dapat diartikan jumlah penduduk meningkat setiap tahunnya tetapi tidak membuat belanja daerah meningkat dengan signifikan. Sehingga hasil ini tidak sesuai penelitian (Utami & Iskandar, 2020) bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Fokus pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dalam mengalokasikan belanja daerah tidak dipengaruhi jumlah penduduk, karena kesejahteraan masyarakat secara umum meningkat menjadi lebih baik seiring dengan meningkatnya PDRB per kapita dari 2014-2018. Penyebab nilai PDRB per kapita meningkat karena lebih rendahnya pertumbuhan penduduk dibandingkan perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku. Serta dilihat kualitas penduduk dari IPM juga meningkat setiap tahunnya. Periode penelitian selama 15 tahun menjadikan hasil penelitian dapat lebih jelas hasilnya, sehingga diketahui bahwa data variabel memang memiliki pengaruh atau tidak.

KESIMPULAN

Kesimpulan hasil pengujian simultan variabel PAD, dana perimbangan, dan jumlah penduduk mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel belanja daerah. Kemudian kedua variabel secara parsial PAD dan dana perimbangan mempunyai hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap belanja

daerah. Namun untuk variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Kemudian saran kepada pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dapat mengintensifkan alokasi belanja daerah untuk menunjang pelayanan publik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kepada peneliti selanjutnya dapat memperbanyak variasi variabel yang relevan, serta menambah periode waktu penelitian sehingga memperoleh hasil pengujian lebih akurat dan lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Arina, M. M., Koleangan, R. A., & Engka, D. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(3), 26–35.
- Bahrudin, R. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Dahliah. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 5(2), 2750–2761. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.839>
- Dumairy. (1999). *Perekonomian Indonesia*. Erlangga.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal* (2nd ed.). CV. Nur Lina.
- Ismail, G., & Rahim, I. (2009). *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU* (2nd ed.). PT Indeks.
- Kanaan, E. S., & Setyowati, W. (2023). Jumlah Wisatawan, Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Aset*, 25(1), 31–39. <https://doi.org/10.37470/1.25.1.214>
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomika Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan* (4th ed.). UPP STIM YKPN.
- Malau, Y. N., Ginting, A. B., Paskah, A., Sitepu, R. B., Etimanta, B., Munthe, B., & Bukit, N. (2023). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk, dan PDRB terhadap Belanja Daerah Provinsi Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1397–1402. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1087>
- Marbun, S., Putri Manalu, E., & Nelsari Malau, Y. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, SiLPA terhadap Alokasi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota. In *Jurnal Paradigma Ekonomika* (Vol. 17, Issue 1). www.bpssumsel.go.id.

- Nailufar, F., & Sufitrayati, S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Kota Banda Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1).
- Santi, S. D., & Iskandar, D. A. (2021). Kebijakan Desentralisasi dan Ketimpangan Capaian Pembangunan Wilayah Di Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(3), 490–506.
- Sjafrizal. (2018). *Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suhaedi, W. (2019). Analisis Belanja Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 18(2).
- Utami, S., & Iskandar, D. D. (2020). Flypaper Effect Terhadap Determinan Belanja Daerah Dan Determinan Pendapatan Asli Daerah Pada 34 Provinsi Di Indonesia Tahun 2013-2018 (Two Stage Least Square). In *JDEP* (Vol. 3, Issue 3). https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Deepublish.
- Zubaedah, P. A., & Hafizi, R. (2022). Sentralisasi Atau Desentralisasi: Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(3), 865–878.